

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pluralitas agama merupakan salah satu pilar fundamental yang perlu dijamin guna menciptakan kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Di tengah kompleksnya pluralitas etnis, budaya, dan agama seperti yang ada di Indonesia, kebutuhan akan relasi antaragama yang harmonis dan kooperatif menjadi sangat penting. Sebagai negara yang mengakui enam agama resmi yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan keberagaman tersebut bukan menjadi sumber konflik, melainkan sebagai sumber kekuatan. Keragaman tersebut menjadi mozaik indah yang menyelimuti bumi pertiwi, sekaligus menghadirkan tantangan signifikan dalam membangun relasi harmonis antarumat beragama.

Namun, upaya menciptakan harmoni beragama masih menemui berbagai kendala. Catatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebutkan bahwa pada tahun 2020, terdapat kasus penodaan agama di 22 provinsi dengan jumlah tertinggi terjadi di Jawa Timur dan Sumatera Utara.<sup>1</sup> Kasus-kasus ini meliputi tindakan seperti penafsiran agama yang berbeda dari *mainstream* di masyarakat, penghinaan simbol agama, hingga penghalangan ibadah. Pada tahun 2023, situasi ini belum menunjukkan perbaikan signifikan.

---

<sup>1</sup> Asfinawati & Aditia B.S., 2021, *Laporan YLBHI Atas Kasus Penodaan Agama Di Indonesia Sepanjang Tahun 2020*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Hlm.5-7

Dilansir dari laman berita daring *BBC News* Indonesia, kasus intoleransi terus terjadi, termasuk penolakan pembangunan rumah ibadah dan diskriminasi terhadap penganut kepercayaan tertentu.<sup>2</sup> Tren ini diperburuk oleh viralnya konten intoleransi di media sosial yang sering kali memicu konflik di dunia nyata.

Dalam konteks sistem sosial yang kompleks, kebutuhan akan ruang publik yang demokratis menjadi sangat penting. Di sinilah pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini, sehingga mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memahami keberagaman, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi sosial sehari-hari. Toleransi bukan hanya sekadar konsep, melainkan sebuah keharusan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan produktif. Dengan demikian, pendidikan menjadi ruang strategis dalam menjawab tantangan intoleransi yang terus mengemuka di tengah masyarakat.

Sekolah sebagai *microcosmos* masyarakat, tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang inklusif di tengah isu pluralitas. Cullen menyebutkan bahwa sekolah bukanlah tabula rasa. Identitasnya dibentuk oleh ekspektasi sejarah, budaya, sosial, agama dan pendidikan dari konteks khusus yang dimiliki oleh masyarakat. Ia mencerminkan keprihatinan, cita-cita dan prasangka masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga

---

<sup>2</sup> BBC News Indonesia, 2024, *Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2023: Pendirian rumah ibadah masih sulit*, diakses pada 26 Februari 2024 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl79dv4x8lyo>

pendidikan formal sudah seharusnya mensosialisasikan nilai-nilai positif guna membangun karakter peserta didik.<sup>3</sup>

Sekolah juga disebut sebagai *melting pot*, yaitu menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, etnis dan suku, termasuk agama yang dianut oleh siswa, guru, dan warga sekolah lainnya.<sup>4</sup> Pluralitas tersebut terjalin dalam interaksi sosial yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya budaya sekolah. Pluralitas tersebut terjalin dalam interaksi sosial yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya budaya sekolah. Menurut Kemendikbud, budaya sekolah memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan karakter dan budaya lokal di mana sekolah itu berada.<sup>5</sup> Tradisi dan kebiasaan yang berkembang di sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung oleh institusi tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian penting bagi penyelenggara pendidikan. Lebih dari sekadar entitas fisik berupa tanah dan bangunan, sekolah merupakan organisasi yang memengaruhi kehidupan sosial para aktor di dalamnya. Dengan kata lain, sekolah berperan sebagai unsur penting dalam membentuk perilaku individu dan menanamkan nilai-nilai yang mencerminkan semangat toleransi dan inklusivitas di tengah kondisi masyarakat plural.

Dalam konsepsi teoritis “*public sphere*” atau ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, ruang publik dipahami sebagai arena diskursif di mana

---

<sup>3</sup> Sandra Cullen, 2006, Plurality and Pluralism in Religious Education dalam *International Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimensions in Education*, London: Springer, Hlm.994

<sup>4</sup> H.A.R Tilaar, 2004, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, Hlm.134

<sup>5</sup> Untung, dkk., 2015, *Model Budaya Sekolah dalam Membentuk Siswa Berkarakter*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hlm.6

individu dapat berdiskusi secara bebas tanpa dominasi satu kelompok tertentu.<sup>6</sup> Konsep ini relevan dengan institusi pendidikan yang seharusnya menjadi wadah untuk membangun dialog dan interaksi inklusif. Sekolah dilihat sebagai institusi pendidikan yang mampu mengakomodasikan ruang publik yang inklusif di tengah pluralitas masyarakat. Di sinilah terjadi reproduksi nilai-nilai toleransi melalui interaksi yang tidak hanya formal tetapi juga informal, sehingga membentuk karakter peserta didik yang terbuka terhadap perbedaan.

Salah satu sekolah yang merepresentasikan pluralitas agama adalah SMAN 12 Kota Bekasi. Kota Bekasi sendiri telah dinobatkan sebagai kota paling toleran kedua di Indonesia berdasarkan riset yang dilakukan oleh Setara Institute bersama Kemendagri pada tahun 2023.<sup>7</sup> Dengan penduduk sebesar 2,56 juta jiwa dari berbagai macam identitas dan latar belakang, Kota Bekasi berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dalam satu wilayah yuridis yang sama.<sup>8</sup> Lingkungan pendidikan dan sekolah di kota ini turut berkontribusi sebagai aparatus negara dalam mewujudkan toleransi melalui budaya sekolah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan harmoni beragama di tengah keberagaman.

SMAN 12 Kota Bekasi merupakan satu-satunya SMA negeri di Kecamatan Bekasi Barat yang merepresentasikan keberagaman masyarakat Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Barat sendiri memiliki luas 14,92 km<sup>2</sup> dan berbatasan langsung

---

<sup>6</sup> Jürgen Habermas, 1996, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, William Rehg (Trans.), Cambridge: MIT Press, Hlm.360

<sup>7</sup> Bekasikota.go.id, 2024, *Naik Peringkat, Kota Bekasi Raih Indeks Kota Toleran*, Diakses pada Februari 2024 melalui <https://www.bekasikota.go.id/detail/naik-peringkat-kota-bekasi-raih-indeks-kota-toleran>

<sup>8</sup> BPS Kota Bekasi, 2022, *Kota Bekasi Dalam Angka Bekasi Municipality in Figures 2022*, Bekasi: Badan Pusat Statistik, Hlm.35

dengan Jakarta Timur. Kecamatan ini hanya memiliki empat sekolah menengah berstatus negeri, sementara yang lain berstatus swasta.<sup>9</sup> Sekolah berstatus negeri tersebut adalah SMPN 14 Kota Bekasi, SMPN 22 Kota Bekasi, SMAN 12 Kota Bekasi, dan SMKN 1 Kota Bekasi. Dari keempat sekolah tersebut, SMAN 12 Kota Bekasi lah yang memiliki tingkat pluralitas agama paling tinggi seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1. 1 Jumlah Peserta Didik berdasarkan Agama**

No	Nama Sekolah	Agama						
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Khongucuu	Lainnya
1.	SMPN 14 Kota Bekasi	1.268	70	-	1	1	-	-
2.	SMPN 22 Kota Bekasi	1.111	49	-	-	1	-	-
3.	SMAN 12 Kota Bekasi	1.109	79	12	2	1	-	-
4.	SMKN 1 Kota Bekasi	1.520	46	5	-	1	-	-

(Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemendikbud, 2024).<sup>10</sup>

Sebagai satu-satunya SMA negeri di wilayah Kecamatan Bekasi Barat, SMAN 12 Kota Bekasi menjadi sekolah favorit. Sekolah ini banyak dibidik oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Sekolah menengah atas ini tidak hanya merepresentasikan pluralitas suku dan etnis, tetapi juga agama yang dianut masyarakat Kota Bekasi khususnya Kecamatan Bekasi Barat.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, sebagian besar peserta didik di SMAN 12 Bekasi ini merupakan bagian dari lingkungan yang sama, yaitu wilayah sekitar sekolah tersebut. Realitas ini juga didukung dengan PPDB sekolah dalam

<sup>9</sup> BPS Kota Bekasi, 2020, *Kecamatan Bekasi Barat Dalam Angka*, Bekasi: Badan Pusat Statistik, hlm. 27, Diakses pada 5 Mei 2024, melalui [Badan Pusat Statistik Kota Bekasi \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

<sup>10</sup> Kemendikbud, 2024, *Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini: Sekolah Kita, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, Diakses pada 5 Mei 2024, melalui <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil>

lima tahun terakhir yang menerapkan kebijakan zonasi sebesar 50%. Peserta didik yang berlatar belakang dari keluarga dengan ekonomi menengah atas hingga menengah bawah mewarnai sekolah ini. Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat ini dapat dikatakan sebagai representasi sederhana dari masyarakat di sekitarnya. Karenanya, dinamika praktik pendidikan toleransi beragama yang terjadi di dalam sekolah ini menjadi penting bagi keberlangsungan sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kecamatan Bekasi Barat.

Begitu juga dengan praktik pendidikan yang ada di SMAN 12 Bekasi. Aturan, pola relasi sosial, hingga kebiasaan yang menjadi budaya sekolah merupakan adopsi dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Peserta didik dan guru memiliki hubungan yang baik dalam mewujudkan kehidupan bersama di dalam sekolah. Sekolah berupaya menciptakan ruang publik inklusif bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sebagai contoh, guru di SMAN 12 Bekasi mensosialisasikan nilai-nilai toleransi melalui kurikulum formal dan *hidden curriculum* dalam budaya sekolah yang berakar pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, *stakeholder* sekolah juga tidak menghalangi peserta didik dan seluruh warga sekolah untuk mengekspresikan identitas keagamaannya, baik di ruang privat maupun ruang publik.

Meskipun peluang untuk menciptakan ruang publik yang inklusif bagi seluruh kelompok agama di sekolah masih terbuka lebar, tantangannya tetap signifikan. Salah satu tantangan utama adalah struktur dominasi otoritas negara terhadap individu yang sering kali termanifestasi dalam praktik pendidikan sehari-

hari. Dalam perspektif pendidikan kritis, fenomena ini tidak hanya terjadi secara alamiah, tetapi juga dipelihara dan diperkuat oleh negara melalui aparatusnya, termasuk sistem pendidikan.<sup>11</sup>

Dominasi ini sering kali diperkuat oleh kebijakan negara melalui kurikulum nasional dan struktur birokrasi pendidikan yang berpotensi memarginalkan kelompok yang tidak memiliki cukup kekuasaan (*powerless*). Akibatnya, representasi nilai-nilai kelompok tersebut dalam kebijakan sekolah cenderung terbatas. Selain itu, keterbatasan ruang dialog antaragama memperkuat minimnya pemahaman lintas kelompok yang mendalam, sehingga toleransi lebih bersifat permukaan daripada substansial. Situasi ini menunjukkan adanya kecenderungan sistem pendidikan yang mengedepankan kepentingan strategis alih-alih kepentingan dialogis.<sup>12</sup>

Kendala-kendala yang disebutkan di atas dapat menyebabkan nilai-nilai toleransi yang diajarkan di sekolah cenderung bersifat normatif, tanpa mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap pentingnya inklusivitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjadikan sekolah sebagai ruang publik yang benar-benar inklusif, di mana semua warga sekolah, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya, dapat berpartisipasi secara setara.

---

<sup>11</sup> Rakhmat Hidayat, 2013, *Pendidikan Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 4

<sup>12</sup> Raymond A. Morrow & Carlos Alberto Torres, 2002, *Reading Freire and Habermas: Critical Pedagogy and Transvornative Social Change*, New York: Teacher College Press, Hlm. 138

Dengan mendorong dialog lintas kelompok, menciptakan kebijakan inklusif, serta membangun budaya egaliter, sekolah dapat menjadi agen perubahan sosial.<sup>13</sup>

Ruang publik (*public sphere*) merupakan arena diskursif yang bersifat inklusif, sehingga tidak dapat menjadi arena dominasi oleh kelompok tertentu.<sup>14</sup> Ruang publik sekolah harus menjadi arena yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah. Di ruang publik sekolah, seluruh warga sekolah dapat saling bertemu untuk saling berinteraksi. Dalam konteks SMAN 12 Bekasi, penelitian ini menjadi relevan untuk menggali bagaimana ruang publik di sekolah dapat dioptimalkan sebagai arena inklusif yang ramah terhadap semua agama.

Sebagai institusi pendidikan formal, SMAN 12 Bekasi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan budaya sekolah yang egaliter, di mana dialog lintas agama tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga praktik nyata. Reproduksi budaya sekolah yang terjadi di dalam arena ruang publik juga harus terbebas dari dominasi. Untuk itu, penelitian skripsi ini mencoba menggali fenomena ruang publik di SMAN 12 Bekasi yang direproduksi dalam interaksi formal dan informal. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana toleransi beragama menjadi diskursus dalam ruang publik SMAN 12 Kota Bekasi yang berusaha inklusif terhadap semua agama. Penelitian ini mengangkat judul berupa “*Public Sphere* Di Sekolah Sebagai Ruang Pembentukan Toleransi Beragama (Studi Kasus SMA Negeri 12 Bekasi)”.

---

<sup>13</sup> Ulfah Masamah dan Mualimul Huda, 2016, Pendidikan Islam, Pendidikan Politik, Dan Dialog Antar Umat Beragama Di Indonesia, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol 4 (1), Hlm.1-19

<sup>14</sup> Jürgen Habermas, 1996, *Op.Cit.*, Hlm.360



Penelitian ini tidak hanya penting untuk konteks lokal di SMAN 12 Bekasi, tetapi juga dapat menjadi referensi untuk membangun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif di tingkat nasional. Melalui paradigma pendidikan kritis, sekolah dapat menjadi katalisator dalam membentuk kesadaran kritis peserta didik agar empatik terhadap kondisi masyarakat yang plural. Temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai proses penciptaan diskursus toleransi beragama dalam *public sphere* sekolah.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya memberi penjelasan bahwa sekolah bukan hanya arena belajar, lebih dari itu, ia adalah ruang publik yang menunjukkan eksistensi dari komunitas masyarakat di sekitarnya. Konsep ruang publik dalam teori *public sphere* Jürgen Habermas menekankan pentingnya arena diskursif yang inklusif, di mana individu dapat berdialog secara bebas dan setara tanpa dominasi kelompok tertentu. Dalam konteks pendidikan, teori ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana sekolah dapat menjadi medium interaksi sosial yang memperkuat nilai-nilai toleransi dan inklusivitas.

Hadirnya SMA Negeri 12 Bekasi sebagai satu-satunya SMA negeri yang berada di wilayah Kecamatan Bekasi Barat membuat sekolah ini menjadi cerminan dinamika pluralitas agama dari masyarakat di sekitarnya. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha merupakan gambaran pluralistik agama yang mewarnai keragaman di sekolah ini pada Tahun Ajaran 2023/2024. Keragaman ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam menciptakan atmosfer sekolah yang inklusif dan toleran.

Dalam menjalankan praktik pendidikan, SMAN 12 Bekasi merumuskan visi pendidikan yang menjadi pedoman dasar dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah. Visi yang dimiliki oleh SMAN 12 Bekasi berbunyi, “Berprestasi Dalam Akademik, Kreatif Berkarakter Berlandaskan Iman dan Taqwa.” Rumusan visi tersebut menyebutkan kata “iman” dan “taqwa” sesuai dengan amanat tujuan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pada Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa “...pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama”. Namun, acapkali implementasi nilai-nilai agama dalam praktik pendidikan khususnya di sekolah-sekolah hanya bertumpu pada satu nilai agama tertentu, yaitu agama Islam sebagai mayoritas. Dengan kata lain, agama mayoritas sering mengalami *culturalised*, sementara agama minoritas hanya diperlakukan sebagai *religionised*.<sup>15</sup>

Beberapa tantangan untuk mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas dalam *public sphere* di SMAN 12 Bekasi masih cukup signifikan. Tantangan pertama berkaitan dengan aktivitas formal dan informal di ruang publik sekolah yang cenderung mengutamakan salah satu agama saja. Misalnya, perayaan hari besar agama yang lebih memprioritaskan agama Islam sering mengganggu aktivitas belajar peserta didik lain dan dapat menciptakan rasa eksklusif pada kelompok agama lain. Selain itu, pembelajaran berbasis diskusi di kelas yang sudah berjalan baik belum sepenuhnya mencakup ruang dialog lintas agama di luar kelas.

Tantangan kedua berupa pengelolaan fasilitas keagamaan di ruang publik sekolah yang belum menunjukkan prinsip kesetaraan. Di SMAN 12 Bekasi, fasilitas

---

<sup>15</sup>Tuula Sakaranaho, T. Aarrevaara, dan J. Konttori, 2020, *The Challenges of Religious Literacy: The Case of Finland*, Springer, Hlm.50

rumah ibadah yang tersedia seperti masjid untuk peserta didik Muslim, belum diimbangi dengan penyediaan ruang ibadah yang memadai bagi agama lain. Sementara itu, peserta didik dari agama lain harus menggunakan fasilitas umum seperti aula atau perpustakaan, yang dapat memengaruhi pengalaman spiritual mereka di lingkungan sekolah.

Tantangan ketiga berupa dominasi budaya suatu kelompok agama tertentu yang termanifestasi dalam bentuk aturan, aktivitas, dan kebijakan sekolah yang kurang mengakomodasi pluralitas secara substantif. Struktur kebijakan sekolah yang berat sebelah ini dapat menciptakan ketimpangan representasi nilai-nilai kelompok agama lainnya dalam budaya sekolah. Tantangan terakhir berupa keterbatasan ruang diskursus rasional lintas agama. Walaupun ruang kelas dan kurikulum telah memberikan kesempatan untuk diskusi rasional berbasis toleransi, belum ada kebijakan spesifik yang mendorong dialog lintas agama di ruang publik sekolah secara lebih terstruktur.

Kendati demikian, di balik tantangan yang ada, masih terdapat peluang besar untuk menciptakan model ruang publik yang inklusif melalui upaya kolaboratif antara guru, peserta didik, dan *stakeholder* sekolah. Pembentukan ruang publik di SMAN 12 Bekasi sebagai wadah interaksi sosial berbasis tindakan komunikatif dapat menjadi kunci untuk mengembangkan daya kritis peserta didik dalam menanggapi toleransi sebagai sikap yang memberikan penghargaan etis kepada kelompok lain. Dengan begitu, di tengah-tengah pluralitas agama yang mewarnai ruang publik pendidikan SMAN 12 Bekasi, sikap toleransi merupakan aktivitas

*learning by doing* yang dilakukan peserta didik dan seluruh warga sekolah untuk menjaga hubungan intersubjektif yang bebas diskriminasi.

Analisis mengenai ruang publik yang ada di sekolah tersebut terkemas dalam konsepsi teoritik *public sphere* gagasan Jürgen Habermas. Dalam teorinya, ruang publik adalah arena diskursif yang memungkinkan adanya dialog yang setara, inklusif, dan bebas dari dominasi kelompok tertentu.<sup>16</sup> Perspektif ini relevan untuk membangun ruang publik yang demokratis di lingkungan pendidikan, terutama dalam mengelola pluralitas agama seperti yang ada di SMA Negeri 12 Bekasi. Implementasi pedagogi yang tercermin dalam pemikiran Habermas ini memberikan dasar analisis bagaimana perwujudan toleransi bergama di lingkungan sekolah memiliki “potensi” dikarenakan adanya prinsip kesetaraan dalam *Public sphere*. Permasalahan dalam penelitian ini juga sejalan dengan kajian sosiologi pendidikan yang mencoba menganalisis hubungan antara aktor pendidikan yang terdapat dalam sekolah.<sup>17</sup>

Sebagaimana hal-hal yang telah disampaikan pada latar belakang, maka penelitian ini membatasi permasalahan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk *public sphere* di SMAN 12 Bekasi sebagai ruang interaksi sosial antarkelompok agama?
- 2) Bagaimana toleransi beragama diwujudkan dalam *public sphere* di SMAN 12 Bekasi?

---

<sup>16</sup> Jürgen Habermas, 1996, *Op.Cit.*, Hlm.360

<sup>17</sup> Dian R. Sari dan Achmad Siswanto, 2021, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Labpendsos UNJ, Hlm.10-11

Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang praktik toleransi beragama di lingkungan sekolah, tetapi juga diharapkan dapat menyumbangkan model konseptual pendidikan berbasis ruang publik yang inklusif. Model ini dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan lain dalam mengelola pluralitas agama di Indonesia, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kajian Sosiologi Pendidikan. Di mana aktivitas pendidikan dan hubungan antar aktor pendidikan di dalam sekolah tersebut termasuk dalam kajian *sociology of education*.<sup>18</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

- 1) Untuk mendeskripsikan bentuk *public sphere* di SMAN 12 Bekasi sebagai ruang interaksi sosial antarkelompok agama.
- 2) Untuk mendeskripsikan perwujudan toleransi beragama dalam *public sphere* di SMAN 12 Bekasi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini menawarkan manfaat yang mencakup aspek teoritis dan praktis.

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperkaya diskursus tentang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis. Kajian ini juga diharapkan menambah referensi akademik dalam studi Sosiologi Pendidikan, terutama dalam

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

membahas bagaimana ruang publik sekolah dapat menjadi arena pembentukan nilai-nilai toleransi dan dialog lintas agama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi berbagai pihak yang berperan dalam bidang pendidikan untuk terus mengawal nilai-nilai toleransi dan demokrasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini membagi signifikansi yang nyata secara praktis ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang praktik pelaksanaan toleransi beragama dalam ruang publik sekolah, dengan fokus pada kebijakan pendidikan di SMAN 12 Bekasi. Gambaran ini dapat menjadi panduan bagi pihak sekolah untuk mengevaluasi sejauh mana mereka telah mengakomodasi keberagaman agama melalui kebijakan dan budaya sekolah.
2. Hasil penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi institusi pendidikan lainnya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, sehingga seluruh warga sekolah merasa terakomodasi dalam mengekspresikan identitas keagamaannya.
3. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan pendidikan, khususnya dalam merumuskan strategi untuk mengelola pluralitas keagamaan di sekolah-sekolah, baik dalam lingkup lokal maupun nasional.

## 1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang dianggap relevan untuk memperkaya penelitian ini. Urgensi penelitian ini berangkat dari tesis utama dalam artikel Gerald Grace yang mengatakan bahwa agama tidak boleh diabaikan pada kajian sosiologi pendidikan.<sup>19</sup> Gagasan sosiolog pendidikan seperti Durkheim dan Apple banyak mengkaji kaitan pendidikan dengan agama. Namun pada perkembangan kontemporer, khususnya dalam dunia ‘barat modern’ sosiologi pendidikan mengalami kemunduran dalam menganalisis agama pada ranah pendidikan. Analisis mengenai agama dalam sosiologi pendidikan secara halus diabaikan dan dianggap tidak penting. Dalam tesisnya, Grace mengharapkan para sosiologis kontemporer untuk peka terhadap kajian agama dan kepercayaan, sama seperti pentingnya bagi mereka melakukan analisis kelas, ras, dan gender dalam budaya pendidikan dan praktik internasional.<sup>20</sup>

Dalam Post-modernisme Barat, dilema terjadi dengan pertanyaan, “apakah identitas agama perlu ditempatkan dalam ranah publik seperti sekolah umum atau hanya untuk disimpan sebagai suatu identitas privat?” Agama adalah bagian dari pengalaman hidup individu dan sosial para aktor pendidikan yang ada di sekolah, sudah barang tentu kajian agama menjadi penting dalam penelitian para sosiolog.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Gerald Grace, 2004, Making Connections For Future Directions: Taking Religion Seriously in the Sociology of Education, *International Studies in Sociology of Education*, Vol. 14(1), Hlm.47

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm.48

<sup>21</sup> Kimberly R. White, 2009, Connecting religion and teacher identity: The unexplored relationship between teachers and religion in public schools, *Teaching and Teacher Education*, Vol. 25(6), Hlm.857

Dalam artikelnya, Kimberly R. White menunjukkan bahwa identitas pribadi seseorang tidak dapat dipisahkan dari identitas profesional seseorang.<sup>22</sup> Atribut-atribut ini menunjukkan bahwa agama memberikan pengaruh pada konstruksi identitas profesional seorang guru. Guru diakui bukanlah agen netral sehingga membuat keputusan yang dipengaruhi oleh keyakinan agama mereka sendiri, maka beresiko timbulnya kemungkinan diskriminasi terhadap kepercayaan lain.<sup>23</sup>

Untuk itu, diperlukan pengawasan kepada guru sebagai aktor pendidikan yang mentransmisi nilai-nilai kepada peserta didik. Sebagaimana studi terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sakaranaho dkk. Menyatakan bahwa diperlukan lebih banyak perhatian pada agama dalam budaya sekolah yang lebih luas, terutama pada relasi antar agama mayoritas dan minoritas.<sup>24</sup> Argumentasi yang kuat diyakini bahwasanya semua pendidik membutuhkan literasi agama agar dapat mengembangkan praktik yang setara dan tidak memihak dalam tata kelola pluralitas agama.

Dalam studinya, Sakaranaho dkk. menaruh perhatian besar pada adanya perbedaan yang jelas dalam bagaimana perbedaan antara agama dan budaya ditafsirkan sehubungan dengan agama mayoritas dan agama minoritas. Agama mayoritas terus memainkan peran penting sebagai sumber penting tradisi dan sebagai penanda identitas dalam budaya sekolah. Di sisi lain, agama minoritas hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan tersebut. Agama minoritas dianggap

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm.863

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm.864

<sup>24</sup> T. Sakaranaho, T. Aarrevaara, dan J. Konttori, *Op. Cit.*, Hlm.49-50



tidak memiliki relevansi pedagogis sebagai aspek warisan budaya atau sebagai penanda identitas peserta didik yang dapat diakui secara positif.<sup>25</sup>

Sementara itu, studi mengenai sekolah agama sebagai institusi yang mendorong masyarakat sipil demokratis dan pluralistik dilakukan oleh Pohl. Studi kasus pada Pesantren Windan memberikan contoh bagaimana sekolah agama menjadi lembaga yang mendukung demokrasi dan toleransi dalam masyarakat majemuk. Mekanismenya ialah melalui metode kurikuler dan partisipasi aktif dalam ruang publik, meliputi: (1) Mempersiapkan siswa sebagai agen perubahan; (2) Keterlibatan aktif dalam kegiatan masyarakat; dan (3) Hubungan baik dengan LSM, yang telah berhasil memberikan peluang tumbuhnya toleransi beragama di masyarakat yang heterogen.<sup>26</sup>

Lebih lanjut Pohl menjelaskan bahwa pada sekolah umum pendidikan agama tidak boleh hilang, namun salah satu agama sepatutnya tidak mengalami diskriminasi hanya dikarenakan sebagai minoritas. Sebagaimana temuan dalam buku tulisan Pohl ini bahwa proses dinamis terjadi di Indonesia, sebuah proses yang mendukung moderasi daripada ekstremisme beragama, sebagai pertanda baik bagi masa depan pluralitas agama.<sup>27</sup>

Studi kasus lain terdapat dalam buku yang merupakan serial monograf hasil riset etnografi yang dikeluarkan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM. Penelitian yang dibukukan ini menggunakan pendekatan etnografi untuk

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm.46

<sup>26</sup> Florian Pohl, 2009, *Islamic Education And The Public Sphere*. Berlin: Waxmann Verlag., Hlm.117-143

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm.144-157

menggali dinamika negosiasi dan resistensi dalam konteks dominasi cara pandang tertentu. Temuan riset ini menunjukkan dinamika ruang publik sekolah yang dipengaruhi oleh pandangan keagamaan eksklusif. Pandangan tersebut mencoba memunculkan atmosfer “Islamis” secara dominan pada lingkungan sekolah. Namun, dominasi ini tidak sepenuhnya diterima, sebab para siswa termasuk mereka yang Muslim juga cenderung menantang atau menegosiasikan pandangan tersebut dalam keseharian mereka.<sup>28</sup>

Adanya indikasi pada keterbatasan interaksi antara mayoritas dan minoritas di SMA yang berlokasi di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto juga disoroti oleh Sulanam.<sup>29</sup> Fokus penelitian ini adalah pada proses adaptasi, negosiasi, serta pembentukan identitas siswa yang memeluk agama minoritas dalam lingkungan mayoritas. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa minoritas menggunakan strategi asimilasi dan akomodasi untuk bertahan dalam lingkungan baru. Di sisi lain, proses negosiasi melibatkan pendekatan bertahap seperti *step-by-step negotiation*, *win-win negotiation*, dan *clear negotiation* dilakukan guna menciptakan penerimaan di kalangan mayoritas.<sup>30</sup>

Studi mengenai literasi keagamaan juga dilakukan oleh Edy Sutrisno.<sup>31</sup> Artikel ini membahas tentang aktualisasi moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini menekankan pentingnya lembaga pendidikan sebagai

---

<sup>28</sup> Hairus Salim HS, N. Kailani, & N. Azekiyah, 2011, *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi Dan Resistensi Di SMUN Di Yogyakarta*, Yogyakarta: CRCS UGM, Hlm.23

<sup>29</sup> Sulanam, 2021, *Interaksi Minoritas-Mayoritas di Sekolah: Studi Terhadap Proses Adaptasi, Negosiasi, dan Pembentukan Identitas Siswa Minoritas dalam Ekosistem Sosial Pendidikan*, Doctoral disertation: UIN Sunan Ampel Surabaya, Hlm.xiv

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm.325

<sup>31</sup> Edy Sutrisno, 2019, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12(2), Hlm.345

laboratorium moderasi beragama, di mana pendekatan sosio-religius diterapkan dalam beragama maupun bernegara. Moderasi sosio-religius yang merupakan perpaduan antara inti ajaran agama dan realitas masyarakat multikultural di Indonesia dapat diintegrasikan dengan kebijakan sosial pemerintah. Lembaga pendidikan menjadi arena strategis untuk mengembangkan sensitivitas siswa terhadap keberagaman, membuka ruang dialog, dan mengajarkan bahwa agama seharusnya membawa pesan kasih sayang, bukan kebencian. Sistem pendidikan juga diharapkan mendukung kebebasan dalam menerima perbedaan tersebut.<sup>32</sup>

Studi kasus berikutnya dalam tinjauan penelitian sejenis ditulis oleh Aniek Handajani, Noorhaidi Hasan, dan Tabita K. Christiani dengan artikel jurnal berjudul “Kecenderungan Intoleransi dan Peran Pendidikan Agama di SMA Negeri Yogyakarta”. Ideologi Islamisme sebagai pemicu intoleransi di kalangan siswa SMA merupakan gagasan utama dalam artikel ini.<sup>33</sup> Melalui kajian ini, mereka menunjukkan bagaimana ideologi radikal menyusup ke lingkungan sekolah dan memengaruhi sikap siswa melalui pendidikan agama yang kurang mengakomodasi keberagaman.

Djunawir Syafar dalam artikelnya yang berjudul “Pluralisme Agama dalam Pendidikan (Potret Toleransi Beda Agama di SD Negeri 46 Hulontalangi Kota Gorontalo)” membahas permasalahan terkait pluralisme agama dalam konteks pendidikan.<sup>34</sup> Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana toleransi antaragama

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hlm.341

<sup>33</sup> A. Handajani, N. Hasan, & T. K. Christiani, 2019, Kecenderungan Intoleransi dan Peran Pendidikan Agama di SMA Negeri Yogyakarta, *Wahana*, Vol. 14(2), Hlm.72

<sup>34</sup> D. Syafar, 2017, Pluralisme Agama dalam Pendidikan (Potret Toleransi Beda Agama di SD Negeri 46 Hulontalangi Kota Gorontalo), *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2(2), Hlm.99

diterapkan di sekolah yang berada di wilayah mayoritas Muslim. Penemuan peneliti menunjukkan bahwa sekolah ini menunjukkan sikap toleransi tinggi terhadap siswa yang memeluk agama berbeda, seperti Islam, Kristen, dan Buddha. Manajemen berbasis sekolah memungkinkan tersedianya guru agama sesuai kepercayaan siswa, serta ruang bagi pelaksanaan ibadah. Tidak hanya itu, sekolah ini juga merayakan hari besar keagamaan dari semua agama yang dianut secara meriah, sehingga tercipta harmoni tanpa konflik pertikaian maupun kekerasan yang bernuansa SARA.<sup>35</sup>

Dominasi agama tertentu sangatlah berbahaya bagi sekolah yang merupakan ruang publik dalam dunia pendidikan. Sebagaimana studi mengenai budaya sekolah yang seharusnya ramah akan pluralitas agama. Peter E. Williams & Melissa Kates menegaskan bahwa tujuan seorang pemimpin sekolah adalah untuk menciptakan budaya sekolah, tertanam dan mencerminkan komunitas lokal, di mana semua warga sekolah dapat berkembang.<sup>36</sup>

Rekomendasi yang diberikan Peter E. Williams & Melissa Kates meliputi: Pertama, mengadopsi norma-norma interaksi komunitas dan pluralisme yang saling menghormati. Kedua, literasi agama yang harus diajarkan sebagai bagian dari kurikulum sosial di sekolah umum. Ketiga, terhubung secara proaktif dengan komunitas agama yang berbeda. Keempat, dorongan pengalaman spritualitas dan agama melalui perizinan untuk beribadah. Kelima, memulai praktikkan dialog

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm.106-109

<sup>36</sup> Peter E. Williams & Melissa Kates, 2022, Creating a Faith-Friendly School Culture in Religiously Plural Communities: A Neglected Facet of Diversity, *School Leadership Review*, Vol. 17(1), Hlm.1

antaragama yang penuh hormat. Keenam, mengenali perbedaan kekuasaan dalam hubungan pengawasan terkait manajemen sekolah yang ramah agama.<sup>37</sup>

Dari berbagai penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa studi-studi tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini, baik dari segi lokus maupun subjek penelitian yang menjadi fokusnya. Salah satu perbedaan utama adalah pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan menerapkan konsep *public sphere* dari Jürgen Habermas. Pendekatan ini memberikan perspektif yang unik dalam menganalisis dinamika sosial di ruang publik sekolah.

Penelitian ini secara khusus mengaitkan kajian sosiologi pendidikan untuk mengamati fenomena interaksi sosial yang terjadi di ruang publik SMAN 12 Bekasi. Penelitian ini juga berupaya untuk mengungkap bagaimana interaksi tersebut berkontribusi pada terbentuknya toleransi beragama di lingkungan sekolah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi sekolah dalam menciptakan ruang publik yang inklusif, yang mampu mengakomodasi keberagaman latar belakang agama seluruh warga sekolah.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm.11-12



**Skema 1. 1 Tinjauan Penelitian Sejenis**

(Sumber: Hasil Pemetaan Teoritik Peneliti, 2024).

## 1.6 Kerangka Konseptual

### 1.6.1 Sekolah sebagai Birokrasi *Modern*

Menurut Weber, birokrasi merupakan perwujudan dari otoritas legal-rasional yang dioperasionalkan melalui adanya apparatus administratif dengan seperangkat prosedural mekanisme. Dalam buku “*Economy and Society*”, Weber menuliskan gagasannya mengenai konsep birokrasi melalui kekuasaan dan wewenang (*power* dan *authority*). Ia membagi *authority* menjadi tiga jenis: legal-rasional (berbasis aturan), tradisional, dan karismatik. Weber mengkaji

konsep birokrasi dalam kaitannya dengan otoritas legal-rasional, yaitu suatu sistem dominasi didasarkan pada rasionalitas dan hierarki yang terstruktur.<sup>38</sup>

Weber mengidentifikasi karakteristik ideal birokrasi ke dalam lima bentuk: (1) Hierarki wewenang, yang ditunjukkan melalui distribusi tugas berbentuk piramida, dengan posisi tertinggi di atas. Keputusan dibuat melalui rantai komando dari atas ke bawah secara terorganisasi; (2) Aturan tertulis, yang mencakup pedoman perilaku untuk semua anggota di setiap tingkatan. Aturan ini tidak hanya menjadi rutinitas tetapi juga memungkinkan fleksibilitas dalam interpretasi; (3) Pegawai penuh waktu dengan gaji, yang memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik. Promosi dapat didasarkan pada keterampilan, senioritas, atau kombinasi keduanya; (4) Pemisahan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, di mana rumah dan kantor memiliki fungsi yang berbeda; (5) Kepemilikan sarana produksi, di mana anggota organisasi bukan pemilik sumber daya material, sehingga pekerjaan terpisah dari kontrol terhadap alat produksi.<sup>39</sup>

Sekolah sebagai bagian dari institusi pendidikan merupakan contoh nyata dari penerapan sistem birokrasi.<sup>40</sup> Sebagai organisasi sosial, sekolah ditandai dengan keberadaan struktur dan norma di dalamnya. Struktur mengacu pada susunan formal maupun informal yang mencakup posisi dan individu di dalam organisasi. Sementara itu, norma merujuk pada standar perilaku yang

---

<sup>38</sup> Max Weber, 1992, *Economy and Society*, Berkeley: University of California Press, Hlm.214-215

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm. 217-218

<sup>40</sup> S. N. Nurochim dan Nurochim, 2020, Sekolah: Kajian Teoretik Perspektif Sosiologi Organisasi, *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, Vol 2(1), Hlm. 66-81

berlaku dalam sistem tersebut. Dalam praktiknya, sekolah memiliki sistem pendidikan yang diatur oleh hukum dan aturan, seperti kurikulum, modul pembelajaran, hingga mekanisme evaluasi.<sup>41</sup> Dengan demikian, sekolah dapat disebut sebagai birokrasi modern karena struktur dan operasionalnya mencerminkan karakteristik utama birokrasi yang diidentifikasi oleh Weber.

### 1.6.2 *Public Sphere* di Sekolah

Konsepsi ruang publik atau *public sphere* diambil dari historis ruang publik para borjuis di Jerman pada abad ke-18. Dalam teoritisasi awal, Habermas menitikberatkan konstruksi ruang publik pada pendekatan Marxian yang memandang kontestasi ruang publik sebagai alat untuk mencapai kepentingan ekonomi-politik para borjuis.<sup>42</sup> Habermas menggambarkan “ruang publik borjuis” sebagai ruang sosial tempat individu-individu berkumpul untuk membahas isu-isu publik secara bersama dan mengorganisasi diri mereka guna melawan kekuasaan sosial maupun publik yang bersifat sewenang-wenang dan menindas.<sup>43</sup>

Konsep ruang publik dalam pandangan Habermas mencakup diskusi yang terbuka mengenai berbagai isu yang menjadi perhatian bersama, di mana argumen yang berbasis diskursif digunakan untuk mencapai kepentingan bersama yang bersifat publik. Konsep ruang publik yang digagas oleh Habermas memiliki tiga ideal normatif yang inheren meliputi: (1) Prinsip akan kesetaraan, (2) mengisyaratkan diskursus yang rasional, (3) Inklusivitas:

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Jürgen Habermas, 1989, *The Structural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into Category of Bourgeois Society*, Massachusetts: MIT Press, Hlm.94

<sup>43</sup> *Ibid.*



sifatnya terbuka dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.<sup>44</sup> Kajian Habermas mengenai “ruang publik borjuis” bertujuan untuk menggambarkan perubahan ruang publik, dari tempat diskusi rasional, debat, dan konsensus menjadi arena massa yang lebih berorientasi pada konsumsi dan pengelolaan budaya oleh perusahaan serta elit dominan. Analisis ini berangkat dari asumsi Mazhab Frankfurt yang melihat transisi dari kapitalisme pasar dan demokrasi liberal pada abad ke-19 menuju kapitalisme negara dan monopoli di abad ke-20, yang ditandai dengan refeodalisasi ruang publik.<sup>45</sup>

Selanjutnya Habermas mengembangkan konstruksi ruang publik sebagai unsur penting dalam membangun demokrasi deliberatif. Ruang publik berfungsi sebagai tempat untuk menyampaikan informasi dan pandangan yang bersifat spontan dan bebas.<sup>46</sup> Ciri utama ruang publik adalah keterbukaannya bagi masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta aksesibilitasnya bagi individu dengan berbagai kondisi fisik.<sup>47</sup> Ruang publik dalam konteks penelitian ini adalah ruang publik sekolah yang diartikan sebagai lingkungan atau situasi di mana seluruh warga sekolah dapat berkomunikasi secara spontan, bebas, adil, dan berinteraksi tanpa adanya upaya diskriminasi. Ruang publik sekolah yang ideal merupakan wadah ekspresi bagi seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Dari ruang publik

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm.36-37

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm.206-211

<sup>46</sup> Jürgen Habermas, 1996, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, William Rehg (Trans.), Cambridge: MIT Press, Hlm.360

<sup>47</sup> Jürgen Habermas, *Loc. Cit.*

sekolah yang inklusif tersebut, maka akan lahir budaya sekolah sebagai arena pendidikan yang demokratis.

Ruang publik juga mencakup hubungan komunikasi dan interaksi antarwarga yang secara kolektif membentuk ruang tersebut.<sup>48</sup> Ruang publik dalam pandangan Habermas sendiri mengalami pergeseran seiring dengan munculnya gerakan sosial baru, teknologi baru, dan ruang interaksi publik yang baru. Habermas menyerukan demokratisasi baru terhadap institusi dan ruang publik pada akhir Transformasi Struktural Ruang Publik, ia menggunakan teori tindakan komunikatif yang digagas dalam buku "*The Theory of Communicative Action*" untuk mempromosikan pemikirannya tentang demokratisasi melalui analisis linguistik.<sup>49</sup>

Begitu pula dengan ruang publik di sekolah yang tidak terbatas oleh definisi ruang secara fisik, melainkan juga ruang komunikasi yang terbangun dan dilakukan oleh seluruh warganya. Interaksi serta tindakan komunikatif antar sesama peserta didik, tenaga pendidik, orang tua siswa, serta warga sekolah disebut sebagai diskursus. Ruang publik menyediakan tempat di mana diskursus dapat terjadi. Diskursus merupakan suatu bentuk komunikasi yang bersifat kolektif, sehingga memungkinkan setiap individu yang memiliki kepentingan untuk berpartisipasi tanpa adanya tekanan.<sup>50</sup> Sebelum mengupayakan suatu diskursus, masyarakat sipil harus berada dalam keadaan

---

<sup>48</sup> F. Budi Hardiman, 2009, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan "Ruang Publik" dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm.187

<sup>49</sup> Jürgen Habermas, 1989, *Loc. Cit.*

<sup>50</sup> Jürgen Habermas, 1987, *The Theory of Communicative Action volume II: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, McCharty (Trans.), Boston: Beacon Press, Hlm.255-256

emansipatoris. Mereka harus terbebas dari hegemoni, dominasi, dan dogmatisme seperti doktrin-doktrin etnosentrisme, primordialisme serta mendahulukan kepentingan pribadi. Melalui proses diskursus yang rasional dan inklusif, peserta dalam ruang publik dapat mengeksplorasi berbagai pandangan dan argumen, mengkritisi pendapat satu sama lain, dan mencari pemahaman bersama atau yang disebut dengan konsensus.<sup>51</sup>

Konsensus dicapai sebagai hasil dari diskursus yang ideal ini, di mana keputusan yang diambil atau pendapat yang terbentuk didasarkan pada argumen yang rasional dan diterima secara sukarela oleh semua peserta.<sup>52</sup> Dengan demikian, konsep ruang publik, diskursus, dan konsensus bersama-sama membentuk kerangka dasar untuk mengkonstruksi demokrasi deliberatif yang digagas oleh Habermas.

### 1.6.3 Toleransi Antarkelompok Beragama

Menurut Rainer Forst, toleransi berarti menerima, menghadapi atau membiarkan.<sup>53</sup> Ia mengungkapkan empat konsepsi toleransi sesuai konteks sejarah. Pertama, konsep izin (*permission conception*) yang menjelaskan konteks hubungan mayoritas-minoritas. Toleransi dalam konsep ini berarti mayoritas sebagai pemegang kekuasaan memberikan izin kepada minoritas dengan syarat minoritas menerima posisi dominan sebagai pemegang kekuasaan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm.257

<sup>53</sup> Rainer Forst, 2013, *Toleration in Conflict: Past and Present*, Cambridge University Press, Hlm.73-75

<sup>54</sup> *Ibid.*

Kedua, konsep *coexistence conception* yang menjelaskan kesetaraan kelompok sosial dengan sesamanya. Dalam konsep ini, toleransi dijadikan sebagai alat untuk menghindari konflik. Ketiga, *respect conception* yang memandang toleransi sebagai sikap saling menghormati terhadap pemikiran, kepercayaan dan keyakinan, gaya hidup, standar etika, serta budaya orang lain secara timbal balik. Dalam sikap penghargaan tersebut, terdapat dua model yakni: (i) *formal equality* dalam relasi antara ruang publik dan ruang privat, (ii) *qualitative equality* dalam konteks relasi antar warganegara dengan kebudayaan yang berbeda.<sup>55</sup>

Keempat, *esteem conception* yang melampaui ketiga konsep sebelumnya dengan memaknai toleransi sebagai penghargaan etis. Toleransi dalam konsep ini tidak hanya berusaha menghormati kelompok berbeda (multikultur) yang dipandang setara, tetapi menganggap bahwa mereka memang memiliki *value* dan patut diberikan penghargaan etis secara lebih dalam. Dengan demikian, toleransi dapat dimaknai dalam dua dimensi: (i) relasi vertikal antara negara dengan warganya, dan (ii) relasi horizontal antarwarga dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam gagasan Michael Walzer, toleransi dalam ruang sosial mencerminkan berbagai kemungkinan sikap. Setidaknya terdapat lima dimensi toleransi: Pertama, menerima perbedaan untuk menciptakan harmoni. Kedua, mengakui adanya perbedaan tanpa harus menyeragamkan. Ketiga, mengembangkan moral stoik yang ditandai dengan menerima bahwa orang lain

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

memiliki hak meskipun hak tersebut tidak selalu mendapatkan simpati. Keempat, menunjukkan keterbukaan, rasa ingin tahu, menghargai dan mau mendengarkan, serta keinginan untuk belajar dari orang lain. Kelima, memberikan dukungan penuh terhadap keberagaman dan menekankan pentingnya kemandirian.<sup>57</sup>

Otfried Höfe, Sosiolog asal Jerman mengungkapkan pengertian toleransi secara etimologis yang bersumber dari Bahasa Latin.<sup>58</sup> Toleransi bersumber dari kata *tolerate* yang artinya “membiarkan” atau “memikul sesuatu”. Pada awal perkembangannya, toleransi dalam konteks agama diartikan sebagai kemampuan untuk menahan rasa tidak nyaman, penderitaan, atau tantangan pribadi yang terkait dengan perbedaan. Namun dalam konteks kekinian, toleransi diartikan sebagai sikap untuk membiarkan agama atau keyakinan lain hadir. Pergeseran makna tersebut membuat toleransi yang dari awalnya adalah moral pribadi, kemudian berubah menjadi suatu moral publik dan sikap etis sosial.<sup>59</sup>

Sebagai suatu moral publik, toleransi mencakup hak dan sikap individu terhadap individu lain, atau keyakinan dan ritual dari satu kelompok agama dalam berinteraksi dengan kelompok agama lain. Dengan argumen tersebut, dapat dikatakan bahwa negara memiliki peran penting untuk mengatur dan mengawasi hubungan toleransi melalui regulasi. Regulasi yang berbentuk

---

<sup>57</sup> Michael Walzer, 1997, *On Toleration. the Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics*, London: Yale University Press, Hlm.10-11

<sup>58</sup> Otfried Höfe, *Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürge*, 2004, *Politische Ethik im Zeitalter der Globalisierung*, München: C.H. Beck Verlag, Hlm.103 dikutip dalam *Jurnal LEDALERO*, Vol. 15 (2), Hlm. 307

<sup>59</sup> *Ibid.*

aturan atau undang-undang bertujuan melindungi pihak minoritas (yang ditoleransi) agar tidak menjadi korban dominasi dari pihak mayoritas (yang menoleransi).<sup>60</sup>

Meskipun regulasi telah diterapkan oleh negara, penting untuk disadari bahwa aturan saja tidak cukup tanpa dukungan pendidikan. Pendidikan tidak hanya membantu menyosialisasikan aturan tentang kerukunan dan toleransi beragama, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang mengatasi perbedaan yang berpotensi memicu konflik. Oleh karena itu, menurut Afifudin, paradigma toleransi memiliki tiga pondasi utama, yaitu pluralisme, inklusivisme, dan multikulturalisme.<sup>61</sup>

Pendidikan tentang toleransi beragama menjadi salah satu tujuan diadakannya literasi keagamaan. Seperti yang dikutip dari *textbook training* Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB), Literasi keagamaan merupakan suatu pendekatan komprehensif untuk memahami dan melakukan jenis keterlibatan yang membedakan pluralisme konvensional yang kuat dari sekadar “toleransi” keragaman yang acuh tak acuh.<sup>62</sup> Pemahaman literasi keagamaan dapat ditumbuhkan melalui pendidikan agama terintegrasi dalam sekolah umum. Penelitian di berbagai sekolah negeri menunjukkan bahwa dengan mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama secara baik di lingkungan

---

<sup>60</sup> Afifudin, 2020, *Inklusivisme Dan Toleransi Kontekstualisasi Pendidikan Agama Di Sekolah*, Banyumas: Pena Persada, Hlm.94

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hlm.95

<sup>62</sup> Chris Seiple, dkk., 2023, *Literasi Keagamaan Lintas Budaya: Anda, Mereka, dan Apa yang Dapat Dilakukan Bersama*, Jakarta: Perkumpulan Institut Leimena, Hlm.25

sekolah, maka moderasi beragama dan budaya damai dapat terbentuk secara lebih cepat.

Dalam konteks kehidupan sosial beragama saat ini, toleransi dapat dikategorikan ke dalam dua model: toleransi pasif dan toleransi aktif.<sup>63</sup> Toleransi pasif merujuk pada sikap menerima perbedaan sebagai suatu fakta yang tidak bisa dihindari karena sifatnya faktual. Sikap ini dibangun atas keyakinan bahwa keberagaman merupakan realitas, baik dalam pikiran maupun tindakan, sehingga setiap kelompok tidak memiliki pilihan lain selain bersikap toleran terhadap kelompok lain.

Sementara itu, pengertian toleransi aktif mencerminkan pendekatan yang lebih maju dibandingkan toleransi pasif. Sikap aktif ini ditunjukkan melalui keterlibatan dan aksi dalam kehidupan kelompok lain, meskipun terdapat perbedaan dan keberagaman. Dalam toleransi aktif, dialog dan kesepahaman yang setara antara pihak-pihak yang terlibat menjadi hal penting, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

Keberagaman agama dalam suatu masyarakat dapat mencerminkan tingkat kebebasan beragama serta kondisi kehidupan keagamaan suatu negara seperti yang dijelaskan oleh Beckford. Keberagaman agama dengan istilah pluralisme bisa diukur berdasarkan jumlah organisasi keagamaan, tradisi keagamaan yang berbeda, atau individu yang mengadopsi kombinasi kepercayaan dari berbagai agama. Pluralisme agama mencakup penerimaan dan pengakuan terhadap berbagai keyakinan di ruang publik. Beckford

---

<sup>63</sup> Afifudin, 2020, *Op.cit.*, Hlm.101

menguraikan bahwa pluralisme yang ideal terjadi ketika masyarakat menilai keragaman agama sebagai sesuatu yang positif dan mendorong koeksistensi yang damai.<sup>64</sup>

Pemahaman pluralisme agama yang dikemukakan oleh Beckford menegaskan bahwa hubungan antaragama yang harmonis tidak hanya bergantung pada keberagaman itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dan negara mengakui serta menerima perbedaan tersebut. Dengan demikian, pluralisme agama bukan sekadar fenomena sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun toleransi yang berkelanjutan di tengah berbagai kelompok keagamaan yang ada.

Dalam hubungan antarkelompok keagamaan, agama tidak hanya menjadi aspek personal, tetapi juga berperan sebagai faktor identitas kolektif yang membentuk interaksi sosial. Keberadaan pluralisme agama dalam suatu masyarakat mencerminkan sejauh mana kelompok-kelompok agama dapat hidup berdampingan tanpa kehilangan identitasnya. Namun, tantangan muncul ketika perbedaan identitas ini memicu stereotip dan prasangka yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Dalam hal ini, literasi keagamaan menjadi elemen kunci untuk mengatasi kesalahpahaman dan membangun dialog yang lebih sehat. Dengan literasi keagamaan yang baik, individu dan kelompok dapat memahami nilai-nilai agama lain secara lebih objektif, sehingga hubungan

---

<sup>64</sup> J.A. Beckford, 2003, *Social Theory and Religion*, Cambridge University Press, Hlm.77-80



lintas agama tidak hanya berhenti pada toleransi pasif, tetapi berkembang menjadi kolaborasi aktif yang mendorong kohesi sosial.<sup>65</sup>

#### 1.6.4 Hubungan Antarkonsep

Ruang publik (*public sphere*) merupakan arena diskursif yang bersifat inklusif, sehingga tidak dapat menjadi arena dominasi oleh kelompok tertentu. Dalam kerangka pemikiran Habermas, terdapat ia mencoba untuk melihat hubungan antara pendidikan dan ruang publik yang demokratis.<sup>66</sup> Habermas secara implisit mengungkapkan bahwa mekanisme pembelajaran yang relevan secara sistematis dapat dilakukan dengan melembagakan diskursus kritis.

Sekolah yang mencerminkan prinsip ruang publik harus menjadi arena yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah. Ruang dengan aksesibilitas yang terbuka bagi seluruh warga sekolah menjadi indikator dalam membangun *public sphere* di sekolah yang ramah terhadap seluruh agama. Selain itu, ruang publik juga harus menjadi ruang komunikasi yang bersifat rasional diskursif. Artinya ruang publik tersebut merupakan ruang di mana seluruh warga masyarakat dilihat secara setara tanpa adanya dominasi.

Konstruksi *public sphere* dalam pandangan Habermas berusaha membaca konteks *civil society* di tingkat negara atau level makro. Namun dalam konteks penelitian ini, konstruksi ruang publik juga terjadi dalam level meso yaitu institusi sekolah. Sekolah sebagai bagian dari institusi pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan negara melalui aturan yang dibuat oleh

---

<sup>65</sup> Chris Seiple, dkk., 2023, *Loc.cit.*

<sup>66</sup> Raymond A. Morrow & Carlos Alberto Torres, 2002, *Op.Cit.*, Hlm.138

kementerian pendidikan dan dinas pendidikan. Aturan-aturan serta budaya yang berlangsung dalam suatu *public sphere* internal di sekolah dibentuk berdasarkan arahan institusi di tingkat atasnya, sehingga interaksi antar warga sekolah di tingkat mikro juga dipengaruhi oleh konteks sosial makro. Realitas tersebut mengisyaratkan bahwa sekolah merupakan bagian dari sistem birokrasi pendidikan yang di dalamnya dipengaruhi oleh hierarki kekuasaan yang didominasi oleh otoritas negara (*state*) dan pasar (*market*). Dengan demikian, kebebasan diskursif yang dalam ruang publik di sekolah akan terancam mengalami distorsi.

Dalam praktik pendidikan di ruang publik sekolah, toleransi beragama merupakan alat untuk mencapai keadaan yang emansipatoris. Untuk itu, *stakeholder* sekolah harus berupaya mengakomodasikan berbagai ekspresi keagamaan yang memang menjadi kebutuhan dasar seluruh penganut agama di sekolah. *Public sphere* sekolah dapat dikatakan ideal apabila keberlangungannya sesuai dengan indikator berupa menekankan prinsip kesetaraan, mengisyaratkan adanya rasionalitas diskursif, serta ruang yang inklusif dan *accecible*. Ruang publik yang ada di sekolah harus dibangun berdasarkan kepentingan-kepentingan praktik keagamaan seluruh warga sekolah tanpa diskriminasi.

Menurut Habermas, pemahaman akan teori sosial menjadi tolak ukur dalam membangun kesadaran kritis seseorang.<sup>67</sup> Indikator ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa menjadi manusia berarti menjadi pemikir, pembicara, dan

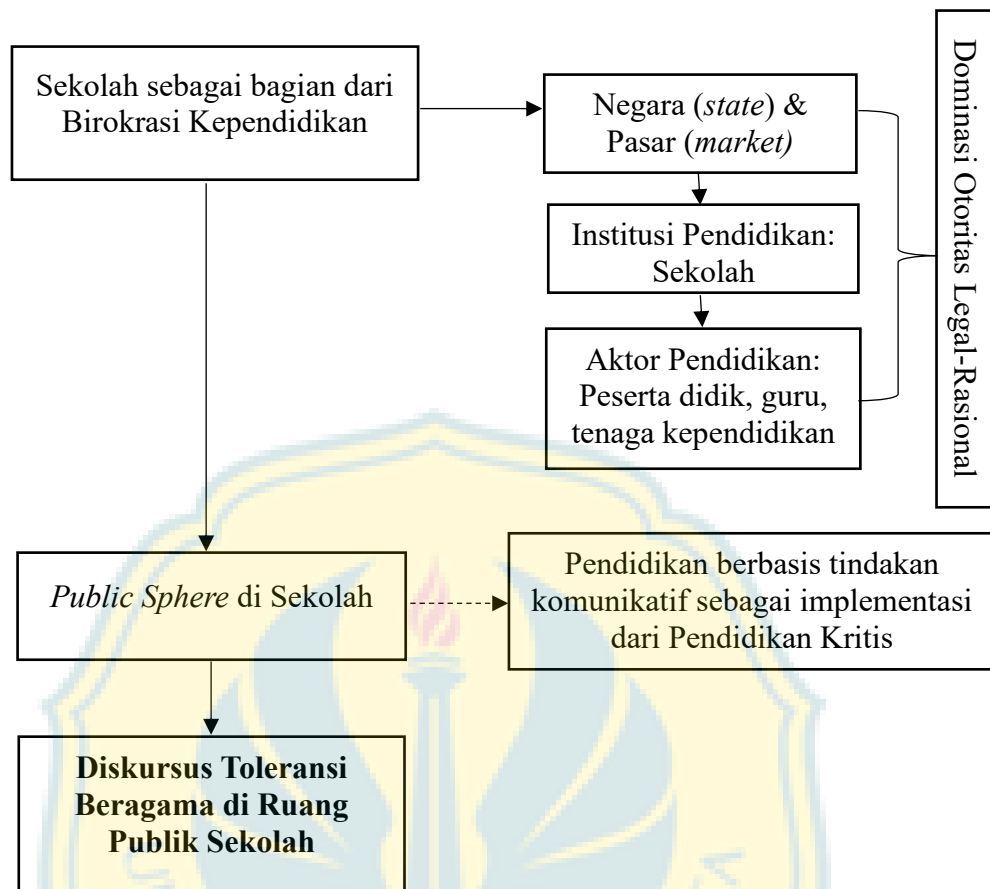
---

<sup>67</sup> Jürgen Habermas, 1987, *Loc.cit.*, Hlm.255-257

pelaku yang berinteraksi dalam konteks sosialnya. Proses ini pada akhirnya membentuk kebiasaan yang berkembang menjadi karakter individu. Dengan begitu, maka toleransi beragama yang ditempatkan sebagai diskursus dengan menekankan pendidikan berbasis komunikasi intersubjektif dapat terlaksana. Untuk itu, praktik pendidikan harus dilaksanakan dengan menekankan komunikasi dan dialog antarpeserta didik dan guru serta seluruh warga sekolah. Peserta didik harus ditempatkan sebagai subjek agar terbangun kesadaran kritisnya.

Melalui pendidikan berbasis dialog, diharapkan terjadi diskursus rasional yang setara antarkelompok agama di sekolah. Namun sebelum membangun suatu diskursus toleransi antarkelompok agama, dibutuhkan pemahaman akan literasi keagamaan pada setiap individu. Konsep literasi keagamaan ini dibangun di atas dasar pemahaman, penghormatan, dan penghargaan terhadap perbedaan, yang disertai kesetaraan. Perbedaan tersebut meliputi identitas, keyakinan etis, pandangan moral tentang hal yang baik dan buruk, serta kebiasaan dalam praktik budaya.

Tiap-tiap kelompok semestinya membangun toleransi bersama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, toleransi dapat dipetakan menjadi dua kategori yaitu toleransi aktif dan toleransi pasif. Nilai-nilai toleransi yang ada dalam literasi keagamaan ini harus menjadi bentuk aksi toleransi aktif yang diimplementasikan seluruh warga sekolah. Toleransi beragama yang terwujud di sekolah dapat diamati melalui proses pendidikan berbasis tindakan komunikasi yang ada di ruang publik sekolah tersebut.



**Skema 1. 2 Kerangka Konseptual Hubungan Antar Konsep**

(Sumber: Hasil Pemetaan Teoritik Peneliti, 2024).

Berdasarkan kerangka konsep di atas, peneliti membuat hubungan antar konsep pada studi Ruang Publik di Sekolah sebagai Ruang Pembentukan Toleransi Beragama dengan studi kasus di SMAN 12 Bekasi. Toleransi beragama di ruang publik sekolah merupakan aktivitas *learning by doing* yang dilakukan peserta didik dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Untuk mencapai konsensus bersama, sekolah harus menciptakan ruang publik yang demokratis, yaitu wadah bagi ekspresi keagamaan yang dianut warga sekolah.

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam pengertiannya, penelitian jenis kualitatif melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami fenomena secara mendalam.<sup>68</sup> Dalam hal ini, peneliti tidak hanya memanfaatkan konsep yang sudah ada tetapi juga mampu mengembangkan konsep baru berdasarkan analisis data. Pendekatan kualitatif bersifat induktif, artinya konsep-konsep baru dibangun bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa dipengaruhi oleh opini pribadi peneliti. Peneliti juga secara aktif merujuk pada literatur untuk mengonseptualisasikan data yang diperoleh dari narasumber.<sup>69</sup>

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian kualitatif adalah studi kasus yang secara intensif berfokus pada suatu kasus yang melihat pada hal-hal detail dalam konteksnya. Studi kasus juga efektif dalam menggambarkan suatu fenomena dan gejala yang terjadi dalam ruang dan waktu. Studi kasus juga menggabungkan seluruh situasi dan berbagai perspektif di dalamnya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Lawrence W. Neuman, 2014, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, USA: Pearson, Hlm.209

<sup>69</sup> John W. Creswell, 2016, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm.37

<sup>70</sup> Lawrence W. Neuman, *Op. Cit.*, Hlm.42

Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif berfokus secara mendalam pada satu kasus tertentu dengan mempertimbangkan detail-detail dalam konteksnya. Studi kasus digunakan untuk menggambarkan fenomena atau gejala yang terjadi dalam ruang dan waktu tertentu, mengintegrasikan seluruh situasi dan perspektif yang ada.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini, kasus yang dikaji adalah Ruang Publik di SMAN 12 Bekasi sebagai wadah pembentukan toleransi beragama bagi warga sekolah. SMAN 12 Bekasi dipilih sebagai studi kasus sebab sekolah berbasis negeri ini menerima peserta didik dari berbagai latar belakang sosio-religius. Oleh karenanya, sekolah ini memiliki gambaran keterwakilan atas pluralitas agama khususnya di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

### **1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Studi riset ini memiliki lokus di sebuah sekolah menengah atas milik Pemerintah yaitu SMA Negeri 12 Bekasi. SMA Negeri 12 Bekasi merupakan sekolah yang terdapat di Jl. I Gusti Ngurah Rai No.32, RT 002/ RW 010, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penulis melakukan riset di sini karena didukung oleh beberapa alasan. Pertama, sekolah ini adalah satu-satunya SMA berstatus negeri yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Barat. Kedua, komposisi pluralitas agama yang cukup heterogen sebab lokasi sekolah ini berada dekat dengan permukiman penduduk yaitu Perumahan Duta Kranji, Violet Garden, serta permukiman lain yang berada di sekitar sekolah.

---

<sup>71</sup> Lawrence W. Neuman, *Op. Cit.*, Hlm.42



**Gambar 1. 1 Lokasi SMAN 12 Kota Bekasi yang Strategis**

(Sumber: <https://www.google.com/maps>, 2024).

Melihat kondisi tersebut, sekolah yang menerapkan sistem 50% zonasi tersebut memiliki mayoritas peserta didik yang berasal dari daerah sekitarnya yaitu Kecamatan Bekasi Barat. Ketiga, secara fisik SMAN 12 Bekasi berlokasi strategis di sekitar pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yaitu berada tepat di jalan provinsi serta berjarak satu kilometer dari Stasiun Kranji.

Penelitian di SMAN 12 Bekasi mulai dilaksanakan pada Bulan Februari 2024 dengan melakukan observasi awal. Selama melangsungkan pengamatan awal, peneliti juga mencoba untuk melakukan wawancara sambil lalu dengan seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu, wawancara kepada informan kunci dan informan triangulasi baru dilakukan sejak April 2024.

### 1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam studi riset ini merupakan institusi pendidikan berupa sekolah menengah atas termasuk para aktor pendidikan di dalamnya yang meliputi kepala sekolah, peserta didik, guru, tenaga kependidikan, hingga orang tua siswa. Sekolah sebagai unit analisis dalam penelitian ini termasuk dalam kategori meso, yakni kelompok sosial, organisasi, atau institusi. Sekolah

yang dipilih sebagai subjek dalam riset ini ialah SMAN 12 Bekasi yang berada di lingkungan Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Peneliti menggunakan dua jenis informan dalam proses wawancara, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah individu yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan utama terkait fokus penelitian, sedangkan informan pendukung memberikan data tambahan untuk melengkapi analisis. Selanjutnya, kebutuhan akan informasi mengenai manajemen berbasis sekolah serta program sekolah dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci yaitu *stakeholder* SMAN 12 Bekasi. Informan kunci lainnya adalah para peserta didik yang sehari-harinya melakukan aktivitas pembelajaran, kegiatan keagamaan, serta aktivitas pendidikan lainnya di SMAN 12 Bekasi. Keseluruhan informan kunci yang sesuai dengan kebutuhan data dalam riset ini berjumlah delapan orang.

**Tabel 1. 2 Karakteristik Informan Kunci**

No.	Nama Informan	Posisi	Target Informasi
1.	Ade Syaeful Bahri, M.Pd	Wakil Kurikulum SMAN 12 Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Program sekolah terkait pelajaran dan kegiatan keagamaan</li> <li>– Kegiatan peserta didik</li> <li>– Karakteristik peserta didik dan tenaga pendidik</li> <li>– Budaya sekolah</li> <li>– Pengalam dalam proses mengajar di SMAN 12 Bekasi</li> </ul>
2.	Eko Priyanto, S.Ag	Wakasek Bidang Sarana Prasarana dan Guru Agama Hindu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fasilitas sekolah</li> <li>– Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah sebagai ruang publik</li> </ul>



No.	Nama Informan	Posisi	Target Informasi
3.	Dra. Wiwiek Herawati, M.Pd	Wakil Kesiswaan SMAN 12 Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kebijakan dan program sekolah.</li> <li>– Budaya sekolah.</li> <li>– Karakteristik peserta didik</li> <li>– Pemanfaatan ruang-ruang publik di sekolah.</li> </ul>
4.	LK	Ketua Rohani Islam SMAN 12 Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengalaman dalam proses pembelajaran di SMAN 12 Bekasi</li> <li>– Pengalaman sebagai pemimpin organisasi</li> <li>– Pengalaman menjalankan kegiatan kerohanian di sekolah</li> </ul>
5.	GS	Ketua Rohani Kristen SMAN 12 Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengalaman dalam proses pembelajaran di SMAN 12 Bekasi</li> <li>– Pengalaman sebagai pemimpin organisasi</li> <li>– Pengalaman menjalankan kegiatan kerohanian di sekolah</li> </ul>
6.	Nr	Peserta didik beragama Hindu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengalaman dalam proses pembelajaran di SMAN 12 Bekasi</li> <li>– Pengalaman menjalankan kegiatan kerohanian di sekolah</li> </ul>
7.	NA	Peserta didik beragama Buddha	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengalaman dalam proses pembelajaran di SMAN 12 Bekasi</li> <li>– Pengalaman menjalankan kegiatan kerohanian di sekolah</li> </ul>
8.	GM	Ketua Osis SMAN 12 Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pelaksanaan program sekolah terkait kegiatan keagamaan</li> <li>– Pengalaman pembelajaran di SMAN 12 Bekasi</li> </ul>

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2024).

Sementara itu, informan pendukung ialah informan yang memberikan data tambahan untuk melengkapi analisis. Dalam penelitian ini, informan pendukung berjumlah dua orang, yang merupakan guru yang terlibat langsung dalam aktivitas pendidikan di SMAN 12 Bekasi. Berikut disajikan karakteristik informan pendukung dalam studi riset ini.

**Tabel 1. 3 Karakteristik Informan Pendukung**

No.	Nama Informan	Posisi	Target Informasi
1.	Carlince BS, S.H., M.Si	Guru mata pelajaran Sosiologi	– Pengalaman dalam proses pengajaran di SMAN 12 Bekasi – Karakteristik peserta didik
2.	Nurita, S.Pd	Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam	– Pengalaman dalam proses pengajaran di SMAN 12 Bekasi – Karakteristik peserta didik

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2024).

#### 1.7.4 Peran Peneliti

Pada penelitian jenis kualitatif, kedalaman pengumpulan data melalui observasi dan wawancara menjadi elemen yang sangat penting. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan narasumber, mengamati situasi lapangan, serta mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh.<sup>72</sup> Pada konteks penelitian ini, narasumber atau informan adalah aktor-aktor pendidikan yang ada di SMAN 12 Bekasi, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, staf pendidikan, orang tua murid, dan komite sekolah.

<sup>72</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, Hlm.11

Selain berfungsi sebagai pengamat dan pengumpul data, peneliti juga bertindak sebagai pelapor hasil penelitian. Sebelum memulai penelitian, peneliti membangun hubungan baik dengan narasumber untuk memperoleh kepercayaan dan izin mempublikasikan data. Peneliti yang merupakan alumni SMAN 12 Bekasi, memiliki *privilege* kemudahan dalam menjalin relasi dengan aktor-aktor pendidikan di sekolah tersebut, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid. Fokus dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui dinamika toleransi agama yang terjadi di sekolah dan bagaimana sekolah bertransformasi menjadi *public sphere* inklusif khususnya bagi masyarakat sekolah di SMAN 12 Bekasi.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dengan narasumber, observasi langsung untuk memahami kondisi di lapangan, serta pengumpulan dokumen pendukung. Dalam proses pengumpulan data, peneliti memilih narasumber yang memiliki relevansi erat dan spesifik terhadap data yang dibutuhkan. Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui tiga teknik pengumpulan data.

##### **1.7.5.1. Observasi**

Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati segala bentuk aktivitas peserta didik dan praktik pendidikan yang ada di SMAN 12 Bekasi. Kegiatan tersebut diawali dengan berdiskusi bersama *stakeholder* sekolah, dan guru tentang bagaimana

upaya *stakeholder* mentransformasikan sekolah menjadi ruang publik inklusif bagi seluruh warga sekolah. Peneliti juga mengamati relasi yang terjalin antara kepala sekolah dan guru, guru dengan guru, guru dengan peserta didik maupun orang tua murid. Selain itu, dilakukan pula observasi dengan pancaindra mengenai bagaimana kondisi fisik di SMAN 12 Bekasi, baik dari sisi fasilitasnya serta penggunaan sarana dan prasarana sekolah yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

Observasi dilakukan dalam beberapa hari guna mengetahui aktivitas kegiatan belajar mengajar di SMAN 12 Bekasi dari hari Senin hingga Jumat. Secara khusus, peneliti juga turut serta mengamati kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) dan Rohani Kristen (Rokris). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengalaman atas realitas praktik toleransi sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian yaitu SMAN 12 Bekasi.

#### **1.7.5.2. Wawancara (*Interview*)**

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan dua metode wawancara, yaitu wawancara mendalam dan wawancara sambil lalu. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci seperti pemangku kebijakan sekolah, guru, dan peserta didik di lokasi penelitian yaitu SMAN 12 Bekasi. Sementara wawancara sambil lalu digunakan untuk menyaring calon informan. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk memaksimalkan hasil pengumpulan data.

### 1.7.5.3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data berupa dokumen sekolah, foto, video, rekaman, memo, dan catatan lapangan (*fieldnotes*). Dokumen ini digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil wawancara. Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan mengacu pada buku, tesis, jurnal, dan dokumen lainnya, baik dalam bentuk fisik maupun digital yang digunakan untuk mendukung analisis penelitian.

### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan data. Berdasarkan model analisis interaktif Miles dan Huberman, data dianalisis melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>73</sup> Reduksi data bertujuan menyederhanakan data untuk mempermudah analisis. Data yang sudah diklasifikasikan kemudian disusun sesuai kategori sejenis, sebelum akhirnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dikolektifkan untuk proses pengolahan yang sistematis.

Selama melakukan pengamatan, peneliti mencatat berbagai informasi penting di lapangan dalam bentuk catatan lapangan (*fieldnote*). Catatan ini menjadi dasar untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berupa taksonomi dan *axial coding*. Proses tersebutlah yang dikatakan sebagai reduksi

---

<sup>73</sup>Matthew B. Miles dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep R. Rohidi (Trans.), Jakarta: UI Press, Hlm.19

data. Langkah berikutnya, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengidentifikasi data berdasarkan karakteristiknya melalui *selective coding*. Terakhir, dilakukan konstruksi temuan berupa *display* dan interpretasi untuk menghasilkan kesimpulan. Untuk memperkuat argumen terkait sekolah sebagai ruang pembentukan toleransi beragama pada penelitian ini, penulis menggunakan konsepsi teoritis *public sphere* yang digagas oleh Habermas.

### 1.7.7 Triangulasi Data

Triangulasi data dilakukan dalam rangka untuk menguji, melakukan perbandingan, serta pengecekan data yang didapat dari data informan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan triangulasi kepada informan yang juga memiliki keterkaitan pada konteks *Public Sphere* yang ada di SMAN 12 Kota Bekasi sebagai ruang pembentukan toleransi agama. Proses triangulasi ini penting dilakukan untuk menyamakan perspektif antara peneliti dan realitas, serta antara informasi satu dengan lainnya. Triangulasi data dilakukan kepada dua narasumber, yaitu dari dua orang tua siswa.

Triangulasi data dilakukan untuk menguji dan membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan kunci. Dalam penelitian ini, yang dipilih sebagai triangulator adalah orang tua siswa yang merupakan anggota komite sekolah. Proses ini dilakukan untuk memvalidasi data terkait ruang publik di SMAN 12 Bekasi sebagai arena pembentukan toleransi beragama. Teknik ini bertujuan menyelaraskan perspektif antara peneliti dan realitas yang ada di lapangan, serta antara informasi satu dengan lainnya. Triangulasi data dilakukan kepada narasumber sebagai berikut.

**Tabel 1. 4 Karakteristik Informan Triangulasi**

No.	Nama Informan	Posisi	Target Informasi
1.	Fajar	Orang tua siswa (anggota komite sekolah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kebijakan dan program sekolah.</li> <li>– Praktik toleransi beragama di SMAN 12 Bekasi.</li> <li>– Pemanfaatan ruang-ruang publik di sekolah.</li> </ul>
2.	Neni Budianti	Orang tua siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Praktik toleransi beragama di SMAN 12 Bekasi.</li> <li>– Kebijakan dan program sekolah.</li> </ul>

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2024).

### 1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diurutkan secara sistematis dalam tiga komponen utama yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab isi dan pembahasan, serta satu bab penutup. Bab I atau Pendahuluan mencakup latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan permasalahan penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, beberapa penelitian terdahulu dalam subbab tinjauan penelitian sejenis, metodologi penelitian (yang diuraikan lagi menjadi subjek penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data), dan ditutup oleh sistematika penulisan.

Bagian selanjutnya, yaitu Bab II membahas mengenai *setting* sosial lokasi penelitian di SMAN 12 Bekasi. Pembahasan tersebut meliputi profil sosial SMAN 12 Bekasi, yaitu sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, komposisi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, serta komposisi peserta didik. Subbab selanjutnya mengenai iklim sosio-kultural SMAN 12 Bekasi yang di

dalamnya membahas tentang budaya sekolah yang secara simultan dilaksanakan di SMAN 12 Bekasi. Lebih lanjut pada subbab berikutnya, dipaparkan juga kurikulum pendidikan formal yang digunakan SMAN 12 Bekasi sebagai pedoman praktik berpendidikan di sekolah.

Pada Bab III akan diuraikan mengenai data penelitian yang ditemukan di lapangan berupa ruang publik keagamaan di SMAN 12 Kota Bekasi. Pembahasan dalam Bab III ini akan dipetakan ke dalam dua subbab besar. Pada subbab pertama dijelaskan mengenai ruang-ruang fisik yang ada di SMAN 12 Bekasi, sebagai fasilitas dan prasarana sekolah yang mewadahi terbentuknya *public sphere* di SMAN 12 Bekasi. *Public sphere* di sekolah ini merupakan ruang terjadinya interaksi dan tindakan komunikasi dari lima agama yang mewarnai pluralitas SMAN 12 Bekasi. Subbab kedua akan membahas mengenai toleransi beragama yang diajarkan melalui pendidikan dalam *public sphere* di sekolah.

Bab IV akan berisi hasil analisis penulis berdasarkan temuan data dan fakta di lapangan mengenai dinamika toleransi beragama yang terjadi di ruang publik SMAN 12 Bekasi. Analisis tersebut didasarkan pada konsepsi teoritis *public sphere* yang digagas oleh Habermas. Pada subbab besar pertama, penulis berusaha menganalisis bagaimana SMAN 12 Bekasi sebagai institusi sekolah merupakan bagian dari birokrasi kependidikan yang modern. Pembahasan selanjutnya berfokus pada analisis bagaimana ruang dialog yang berlangsung dalam ruang-ruang fisik sekolah diidentifikasi sebagai *public sphere* sesuai dengan gagasan Habermas. Subbab terakhir merupakan refleksi kependidikan, yaitu bagaimana mewujudkan *public sphere* yang ideal di sekolah melalui pendidikan emansipasi.



Selanjutnya pada Bab V akan menjadi bagian penutup yang berisi beberapa kesimpulan penulis terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan, sebagai jawaban terhadap fokus penelitian atau rumusan masalah dan tujuan-tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab pertama. Bab ini akan diakhiri dengan rekomendasi dari penulis, yaitu ditujukan kepada para akademisi dan praktisi pendidikan, sekolah, Pemerintah, serta masyarakat.



*Intelligentia - Dignitas*